



Media Title	Investor Daily		
Head Line	2014, Dana PMN Tol Trans-Sumatera Rp 5,1 Triliun		
Date	3 Mar 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	17	Article Size	
Journalist	Eko Adityo Nugroho	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

2014, Dana PMN Tol Trans-Sumatera Rp 5,1 Triliun

Oleh Eko Adityo Nugroho

JAKARTA – Pemerintah akan memberikan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5,1 triliun kepada PT Hutama Karya untuk bisa membangun tol trans-Sumatera pada tahun ini. Jumlah ini lebih besar dibandingkan alokasi PMN tahun lalu senilai Rp 2 triliun, meski tidak bisa dicairkan karena belum ditandatangani peraturan presiden (perpres) mengenai penugasan tersebut.

"Besaran dana PMN kalau tidak salah Rp 5,1 triliun itu sudah ada di dana cadangan. Begitu perpres ditandatangani Presiden, lalu dibahas dengan Menteri Keuangan dan DPR, anggarannya akan keluar kira-kira Oktober 2014 melalui anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP)," ungkap Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kementerian Pekerjaan Umum, sambung dia, saat ini tengah memfinalisasi draf rancangan perpres (raperpres) penugasan badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun jalan tol sepanjang 2.700 kilometer tersebut. Dalam draf raperpres tersebut sudah disebutkan bahwa Hutama Karya yang akan ditugasi mengerjakan jalan tol senilai Rp 360 triliun tersebut.

"Namun, kalau bicara keadilan, harusnya (dalam perpres) itu bisa BUMN lain yang juga 100% dimiliki negara. Mereka nanti bisa bergabung untuk bangun jalan tol itu. Saya sendiri cenderung bisa yang lain," papar Djoko.

Namun begitu, lanjut dia, jika bukan Hutama Karya yang ditunjuk Presiden, tidak ada jaminan yang diberikan pemerintah dalam bentuk PMN. Dengan demikian, dalam raperpres tersebut sudah harus di-

sebutkan Presiden menunjuk BUMN itu.

Djoko menambahkan, pembangunan tol trans-Sumatera yang terdiri atas 23 ruas tersebut tentu akan berat dilakukan oleh Hutama Karya yang dinilai belum berpengalaman membangun dan mengoperasikan jalan tol. Maka dari itu, sambungnya, dalam raperpres juga ada pasal yang mengatur bila pembangunan tol trans-Sumatera mandek di tengah jalan.

"Nanti ada pasal *surface level agreement* yang kira-kira berisi mengenai target waktu dan pelaksanaan. Kalau itu tidak dipenuhi, pemerintah bisa melakukan hal lain, seperti menender atau menerima usulan badan usaha lain," kata dia.

Nantinya, sambung dia, Hutama Karya juga harus membentuk anak usaha di tiap jalan tol yang menjadi penugasan perseorangan. Dengan demikian, Hutama Karya akan menjadi induk perusahaan dari beberapa ruas tol yang dikerjakan. "Jadi, kalau Medan-Binjai dikerjakan Hutama Kar-

ya, dia harus buat anak usaha untuk tol itu," ungkap Djoko.

Tidak Bersinggungan

Di sisi lain, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) justru telah memulai peninjauan pasar tol Medan-Binjai. Bahkan, tol ini merupakan salah satu dari empat ruas tol trans-Sumatera yang akan mulai dibangun pada tahap awal selain tol Palembang-Indaralaya, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Bakauheuni-Terbanggi Besar.

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali mengungkapkan, tol Medan-Binjai yang paling mungkin untuk dilelang, menyusul proses pembebasan lebih mudah dan cepat karena menggunakan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PT PN).

"Saat ini, Ditjen Bina Marga tengah mengajukan izin prinsip penggunaan lahan itu kepada Kementerian BUMN. Bila izin diperoleh, sebanyak 70% dari total kebutuhan lahan tol Medan-Binjai sudah bi-

sa terpenuhi," tutur dia.

Selanjutnya, sambung dia, BPJT bisa menggelar prakualifikasi tender untuk tol tersebut selama lima hingga enam bulan untuk mendapatkan peserta yang lolos. Namun, dalam proses ini peserta prakualifikasi lelang diminta bersedia melepas kepemilikan konsesi bila tol ini menjadi bagian dari penugasan pemerintah pembangunan tol trans-Sumatera.

"Jadi, ini biar tidak bertabrakan dengan perpres. Tetapi kalau tidak disebutkan dalam perpres, proses tender bisa berjalan terus," tegas dia.

Setelah mendapatkan peserta yang lolos prakualifikasi, BPJT akan menyeleksi pemenang tender pengerjaan tol tersebut selama enam bulan. Kemudian, pemenang tender diberi waktu enam hingga 12 bulan untuk membentuk badan usaha jalan tol berbendera perusahaan terbatas, menyiapkan dokumen pengerjaan, serta mencari pendanaan pembangunan tol tersebut.